

## ABSTRAK

Gang Jun Hyeok (01052180005)

### **ANALISIS “PENYELIDIAN” PASAL 16 (1) (b) UNDANG-UNDANG NOMOR. 6 TAHUN 2011 TENTANG UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN DENGAN KEPUTUSAN PENGADILAN NO. 40/PUU-IX/2011**

(ix + 79 halaman)

Tujuan Penulis menulis skripsi ini adalah untuk menjawab rumusan masalah di atas, yaitu: Untuk menganalisis dan mengevaluasi undang-undang terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan untuk mengetahui apakah Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bertentangan dengan salah satu sistem hukum Indonesia dengan melihat putusan Mahkamah Konstitusi (No. 40/PUU-IX/2011). Menganalisis rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan terhadap kasus tersebut. Tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Makalah ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama penelitian, sehingga penulis dapat melakukan analisis berdasarkan informasi tersebut. Pengumpulan data dalam tulisan ini akan dianalisis secara kualitatif. Makalah ini menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menyelidiki dan menentukan solusi atas masalah yang diangkat: pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Undang-Undang Keimigrasian tahun 2011 disusun sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kemudian suatu peraturan perundang-undangan akan dapat mencapai tujuannya, apabila penegakan hukum peraturan tersebut dapat dilaksanakan, sehingga bunyi pasal tersebut tidak hanya sekedar slogan, dan dapat memberikan pedoman yang tepat kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. tugas. (2) Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak bertentangan dengan Pasal 28A dan D UUD 1945. Padahal, itu merupakan implementasi dari Pasal 28J ayat (2) UU tersebut UUD 1945. Dalam UU Keimigrasian ini tidak ada pasal yang mengatur tentang jaminan “pola pembangunan di bidang politik, hukum, keamanan, dan pemerintahan yang sesuai dengan generasi sekarang dan yang akan datang”, “pengakuan hak-hak minoritas”, dan “keterlibatan” masyarakat adat dan masyarakat adat, perempuan dan masyarakat marginal lainnya”, namun bukan berarti UU Keimigrasian ini bertentangan dengan indikator ini, mengingat UU Keimigrasian mengatur secara umum.

Referensi: 6 Buku, 16 Peraturan Perundang-undangan, 7 Website/Internet, 1 Jurnal

Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Keimigrasian, Hukum Keimigrasian

## ABSTRACT

Gang Jun Hyeok (01052180005)

### **ANALYSING “INVESTIGATION” ON ARTICLE 16 (1) (b) OF LAW NO. 6 OF YEAR 2011 CONCERNING IMMIGRATION LAW WITH THE DECISION OF THE COURT NO. 40/PUU-IX/2011**

(+pages)

The Author's purpose of writing this thesis is to answer the formulation of issues stipulated above, namely: To analyze and evaluate the law against Article 16 paragraph (1) letter b of Law No. 6 Year 2011 on Immigration, and to know whether the Article 16 paragraph (1) letter b of Law No. 6 Year 2011 concerning Immigration contradicts any of the Indonesian legal system by seeing the decision of the Constitutional Court (No. 40/PUU-IX/2011). To analyze the recommendations on the results of the legal analysis and evaluation that have been carried out on the case. This paper is using normative legal research. This paper makes use of secondary data as the primary source of research, allowing the author to do an analysis based on this information. The collection of data in this paper will be analyzed in qualitative data. This paper uses a different approach to investigate and determine the solutions to the issues that have been raised: statutory approach and conceptual approach. Based on the results of the analysis, the conclusions of this study are: (1) The 2011 Immigration Law is structured in such a way that the stated objectives can be achieved. Then, a statutory regulation will be able to achieve its objectives, if the law enforcement of the regulation can be implemented, so that the sound of the article is not only a slogan, and can provide appropriate guidelines to law enforcement officers in carrying out their duties. (2) Article 16 paragraph (1) letter b of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration does not contradict Article 28A and D of the 1945 Constitution. In fact, it is an implementation of Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution. In this Immigration Law, there are no articles that regulate the guarantee of "patterns of development in the fields of politics, law, security and governance that are in accordance with current and future generations", "recognition of minority rights", and "involvement of indigenous and tribal peoples local communities, women and other marginalized communities", but that does not mean that this Immigration Law contradicts this indicator. This is considering that the Immigration Law regulates in general.

References: 6 Books, 16 Laws And Regulations, 7 Website/Internet, 1 Journal

Keywords : Decision Of The Court, Immigration, Immigration Law